



## Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (Proklim) Di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Dhea Rizky Amalia<sup>1</sup>, Indah Ayu Permana Pribadi<sup>2</sup>, Ariesta Amanda<sup>3</sup>, Chamid  
Sutikno<sup>4</sup>, Zaula Rizqi Atika<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juni 8, 2026

Revised Juni 8, 2026

Accepted Juni 12, 2026

#### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,  
ProKlim,  
Perubahan Iklim,  
Partisipasi Masyarakat,  
Van Meter dan Van Horn

#### Keywords:

Policy Implementation,  
ProClimate,  
Climate Change,  
Public Participation,  
Van Meter and Van Horn

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tahun 2023. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola ProKlim, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ProKlim di Desa Cikidang telah berjalan dengan baik, ditandai oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, pertanian terpadu, dan penghijauan. Keberhasilan program didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan serta kondisi sosial masyarakat yang partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ProKlim di Desa Cikidang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, sehingga berpotensi menjadi praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di tingkat desa.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of the Climate Village Program (ProKlim) policy in Cikidang Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2023. This program is the government's effort to increase community resilience to the impacts of climate change through community participation-based adaptation and mitigation actions. The research used a qualitative descriptive method with a Van Meter and Van Horn policy implementation model approach that included six variables, namely policy standards and targets, resources, interorganizational relationships, characteristics of implementing agents, social, political and economic conditions, and the disposition of implementors. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation involving the village government, ProKlim management, the Environmental Service and the community. The research results show that the implementation of ProKlim in Cikidang Village has gone well, marked by high community participation in environmental management activities, such as waste management, water conservation, integrated agriculture and greening. The success of the programme was supported by synergies among stakeholders as well as by the participatory social*

---

*conditions of the population. This research concludes that the implementation of ProKlim in Cikidang Village contributes to increasing environmental awareness and community capacity to face climate change, so that it has the potential to become good practice (best practice) in community-based environmental management at the village level.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license*



---

**Corresponding Author:**

Dhea Rizky Amalia  
Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto,  
Purwokerto, Indonesia  
Email: dheyarilia123@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah proses administratif yang bersifat umum dan dapat dianalisis pada tingkat program tertentu. Proses ini akan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana disiapkan dan dialokasikan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Implementasi kebijakan berfungsi sebagai penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya, serta hasil dari kegiatan pemerintah. Sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6) tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Setiap kebijakan yang dirumuskan harus diimplementasikan, sehingga implementasi kebijakan menjadi suatu keharusan karena berbagai alasan dan perspektif. Tanpa adanya implementasi yang efektif, keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik [1].

Masalah lingkungan hidup merupakan sebuah kondisi aktual secara global tentang terjadinya kerusakan ataupun pencemaran lingkungan akibat dari adanya beragam aktivitas manusia. Peristiwa ini ditandai dengan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Akibat yang ditimbulkan, terjadinya peningkatan radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer sehingga berdampak pada kenaikan suhu bumi yang dikenal sebagai pemanasan global. Laporan Perubahan Iklim yang disusun oleh *Copernicus Climate Change Service (C3S)* melansir bahwa tahun 2023 menjadi tahun 'terpanas'. Pada tahun tersebut, suhu rata-rata global naikhingga 1,48°C mendekati ambang batas kenaikan suhu 1,5°C yang disepakati dalam perjanjian Paris. Laporan tersebut menuliskan rata-rata suhu global pada tahun 1850-2020 berada dalam suhu terpanas dan menandakan bahwa perlunya tindakan masyarakat dunia untuk mengantisipasi perkiraan kenaikan suhu udara yang mengakibatkan pemanasan global [2].

Pada tingkat global, penanganan perubahan iklim menjadi salah satu tujuan utama dalam komitmen *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dideklarasikan oleh negara-negara melalui Sidang Umum PBB. Salah satu target dalam SDGs adalah menjaga kenaikan suhu di bawah 2°C. Indonesia telah menyetujui dan berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai yang tercantum dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Dalam Diskusi Pojok Iklim bertema "Ketahanan Iklim, SDGs, dan NDC" yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novia Widyaningtyas, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), menekankan bahwa untuk mencapai target NDC, Indonesia perlu menggerakkan langkah strategis dengan melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perubahan iklim melalui berbagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup. Pengendalian

perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi, atau kombinasi keduanya, sangat penting dimulai dari tingkat desa, karena mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Upaya mengatasi perubahan iklim di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu program nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya lokal melawan perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup. Pada acara pembukaan *Climate Action Summit (CAS)* pada 25 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh potensi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Melalui pernyataannya, ia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi, beradaptasi, dan memitigasi dampak perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim, yang direncanakan mencakup 20.000 desa pada tahun 2024 [3]. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendes, PD TT Nomor 16 Tahun 2018. Dengan melihat peran Desa menjadi sangat penting maka perubahan iklim dan efek gas rumah kaca diharapkan dapat dipahami Desa dengan melakukan upaya yang mengarah pada pengendalian perubahan iklim.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup Nasional dalam rangka mendorong masyarakat dan seluruh pihak untuk melaksanakan aksi lokal meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Program Kampung Iklim (ProKlim) mulai diluncurkan pada tahun 2012. Proklm telah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk jangka panjang, dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan hingga tahun 2030. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap daerah di tingkat dusun atau Desa/Kelurahan minimal memiliki satu program unggulan Kampung Iklim. Untuk mencapai tujuan ini, ProKlim dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu pengembangan di tahun 2012, implementasi di tahun 2017, penguatan komitmen di tahun 2020, percepatan implementasi di tahun 2025, serta menuju pencapaian NDC (*Nationally Determined Contribution*) di tahun 2030 [4].

Tabel 1. Potensi PROKLIM Wilayah Jawa Bali Nusra

NO	WILAYAH	JUMLAH POTENSI
1.	Nusa Tenggara Timur (NTT)	587
2.	Nusa Tenggara Barat (NTB)	299
3.	Bali	353
4.	Jawa Timur	2.085
5.	Yogyakarta	339
<b>6.</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.710</b>
7.	Jawa Barat	1.836
8.	DKI Jakarta	267

---

9.	Banten	588
----	--------	-----

---

Sumber : (Mengenai Proklam Lebih Dekat, n.d.) Diakses 12 Oktober 2024

Berdasarkan data di atas, menunjukkan data potensi Program Kampung Iklim (ProKlim) di berbagai provinsi di Indonesia berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per tanggal 7 Maret 2022. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah potensi ProKlim tertinggi dengan 3.710, diikuti oleh Jawa Timur dengan 2.085, dan Jawa Barat sebanyak 1.836. Provinsi lain seperti NTT, NTB, Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten memiliki jumlah potensi yang lebih rendah, dengan NTT mencapai 587 dan DKI Jakarta yang terendah di angka 267. Data ini memberikan gambaran tentang sebaran potensi ProKlim di Indonesia, dengan fokus terbesar di Jawa Tengah.

Kabupaten Banyumas dengan jumlah kecamatan terbanyak yaitu 27 kecamatan dari tahun 2018 hingga 2022, memiliki potensi besar dalam penerapan program Kampung Iklim (Proklam). Banyaknya kecamatan ini berarti semakin banyak wilayah yang dapat terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Setiap kecamatan di Banyumas memiliki potensi unik dalam hal sumber daya alam, karakteristik lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam program Proklam. Dengan jumlah kecamatan yang besar, program ini dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan terkoordinasi, memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, peningkatan ketahanan iklim, dan kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim [5].

Tabel 1. Lokasi ProKlim di Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA PROKLIM
1.	Baturraden	7
2.	Cilongok	5
3.	Karanglewas	2
4.	Kemranjen	8
5.	Kembaran	2
6.	Purwokerto Timur	1
7.	Banyumas	7
8.	Kedungbanteng	2
9.	Purwokerto Barat	2
10.	Purwokerto Utara	4
11.	Lumbir	2
12.	Kebasen	4
13.	Pekuncen	3
14.	Tambak	2
15.	Purwokerto Selatan	2
16.	Sokaraja	3
17.	Somagede	5
18.	Sumpiuh	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2023, ProKlim mencatat sebanyak 6.708 lokasi yang terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Setiap tahunnya, Proklam memberikan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan komitmen dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Penghargaan ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu Proklam Pratama, Proklam Madya, Proklam Utama, dan Proklam Lestari yang disesuaikan dengan tingkat kontribusi dan keberhasilan program.

Berikut data lokasi peraih penghargaan ProKlim di Kabupaten Banyumas:

Tabel 2. Lokasi Peraih Penghargaan ProKlim di Kabupaten Banyumas

PENGHARGAAN	LOKASI	JUMLAH
<b>Tropy, Sertifikat, Insentif</b>	<b>Desa Cikidang, Kec. Cilongok</b>	<b>1</b>
Sertifikat	Desa Kejawar Kec. Banyumas	
	Dusun 1 Desa Pekunden Kec. Banyumas	
	Desa Sudagaran Kec. Banyumas	
	Desa Kebumen Kec. Baturraden	
	Desa Pamijen Kec. Baturraden	
	Desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng	10
	Desa Alasmalang Kec. Kemranjen	
	Desa Besuki Kec. Lumbir	
	Kel. Kober Kec. Purwokerto Barat	
	Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara	
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Sumber: (Sigit, 2023) Diakses 12 Januari 2025

Berdasarkan data penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Banyumas, terlihat bahwa Kabupaten Banyumas menunjukkan upaya aktif dalam menggerakkan masyarakat di berbagai wilayah untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk mencapai keberlanjutan lingkungan melalui ProKlim, yang diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim secara menyeluruh di tingkat Desa. Desa Cikidang Kecamatan Cilongok merupakan salah satu Desa di Kabupaten Banyumas yang mendapatkan Penghargaan terbanyak. Sebagaimana dibuktikan dari Pemerintah Desa Cikidang yang didapatkan melalui surat undangan penerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Desa Cikidang meraih penghargaan ProKlim Utama.

Tabel 3. Daftar penghargaan PROKLIM di Jawa Tengah Pada Tahun 2023

JENIS PENGHARGAAN	LOKASI	JUMLAH
Trophy Proklam Lestari	Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	
	Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang	
	Dukuh Bodeyan, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	4
	Dusun Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo	
Trophy Proklam Utama	<b>Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas</b>	
	Dusun Ngampel, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar	

Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	
Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	7
Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang	
Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	
Dusun Gondang, Desa Gondang Kecamatan, Watumalang, Kabupaten Wonosobo	
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Sumber : Pemerintah Desa Cikidang (Surat Undangan Penghargaan dari KLHK)

Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu Desa yang telah mengimplementasikan Proklamasi sejak tahun 2015. Desa Cikidang mendaftarkan diri sebagai desa Program Kampung Iklim (ProKlim) dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah desa dan masyarakat terhadap pentingnya upaya penanganan perubahan iklim yang mulai dirasakan dampaknya, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga. Perubahan pola cuaca, ancaman kekeringan, serta potensi kerusakan lingkungan mendorong desa untuk mencari solusi yang berkelanjutan melalui program berbasis lingkungan. Selain itu, adanya dorongan kebijakan dari pemerintah serta peluang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pendukung keputusan tersebut. Desa Cikidang juga melihat ProKlim sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memperoleh pembinaan dan pengakuan dari pemerintah. Dengan demikian, pendaftaran sebagai desa ProKlim merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan tanggap terhadap perubahan iklim. Implementasi Proklamasi di Desa Cikidang telah menunjukkan berbagai hasil positif.

Dalam program Kampung iklim ini terdapat tiga aspek yang menjadi indikator penting yaitu adaptasi, mitigasi dan kelembagaan atau dukungan keberlanjutan [6]. Berikut adalah program yang terdapat di PROKLIM Desa Cikidang :

Tabel 4. Program ProKlim Desa Cikidang

Aspek	Program/Kegiatan	Keterangan
Adaptasi	Pengelolaan Air	Pembuatan penampungan air hujan, sumur resapan, dan lubang biopori untuk mengantisipasi kekeringan dan banjir.
	Ketahanan pangan	Penerapan pertanian terpadu melalui metode <b>Mina Tani</b> (ikan & padi) dan <b>Wana Tani</b> (hutan & tani) untuk optimalisasi lahan.
	Pola Hidup Sehat (PHBS)	Penerapan gerakan 3M (Menguras, Menutup, Menimbun) dan penggunaan fasilitas kesehatan (Posyandu/Puskesmas) untuk mencegah penyakit akibat perubahan iklim.
	Daur Ulang Sampah	Mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis seperti tas dan tempat tisu agar tidak menjadi sarang penyakit.
Mitigasi	Penghijauan (Vegetasi)	Melakukan penanaman pohon secara rutin dan melarang penebangan pohon penyerap air serta pohon produktif.

	Pertanian Ramah Lingkungan	Penggunaan pupuk organik untuk menjaga unsur hara tanah dan kestabilan ekosistem pertanian.
	Pengelolaan Limbah Tanpa Bakar	Larangan membakar sampah atau sisa hasil panen (jerami) di lahan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kualitas tanah.
Kelembagaan	Struktur Organisasi	Pembentukan Tim ProKlim Desa Cikidang sebagai penggerak aksi lingkungan di tingkat lokal.
	Kemitraan & Pembinaan	Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas dan perguruan tinggi (mahasiswa KKN) dalam pendampingan program.
	Dukungan Kebijakan	Komitmen pemerintah desa dan tokoh masyarakat (seperti PKK) untuk mensukseskan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim.

Sumber : (Cikidang TV, n.d.) *Diakses 13 Januari 2025*

Keberhasilan Proklim di Desa Cikidang menunjukkan bahwa program ini dapat di replikasi di desa-desa lain di Indonesia. Pemilihan Desa Cikidang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertama, desa ini telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan bahkan berhasil meraih penghargaan kategori ProKlim Utama, yang menunjukkan adanya capaian nyata dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kedua, Desa Cikidang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi air, sehingga memenuhi kriteria sebagai desa yang aktif dan responsif terhadap program berbasis masyarakat. Ketiga, keberagaman program yang dijalankan, baik pada aspek adaptasi, mitigasi, maupun kelembagaan, menjadikan desa ini representatif untuk dikaji secara mendalam. Keempat, adanya dukungan dari pemerintah desa serta sinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup turut memperkuat implementasi program. Selain itu, aksesibilitas lokasi yang cukup mudah serta ketersediaan data dan informan yang relevan juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan Desa Cikidang sebagai lokasi penelitian. Replikasi Proklim dapat membantu Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Proklim dan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam replikasi Proklim di desa-desa lain.

## 2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, serta di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Desa Cikidang dipilih karena telah ditetapkan sebagai desa ProKlim oleh pemerintah daerah, yang menegaskan adanya komitmen dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, desa ini juga memperoleh penghargaan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim), menunjukkan capaian nyata dalam pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tingginya partisipasi masyarakat Desa Cikidang dalam program ProKlim memperlihatkan kesadaran kolektif serta keterlibatan aktif masyarakat. Keberagaman strategi dalam implementasi program juga menjadi daya tarik penelitian ini. Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dipilih karena mampu memberikan data dan wawasan pendukung terkait kebijakan dan pelaksanaan ProKlim. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berangkat dari pola pikir induktif yang berlandaskan pada pengamatan objektif dan partisipatif terhadap fenomena sosial, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun yang berpotensi di masa depan.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti, dalam hal ini terkait implementasi kebijakan ProKlim di Desa Cikidang. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang berdasarkan model Van Horn dan Van Meter. Fokus tersebut mencakup aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-politik-ekonomi, serta disposisi implementor. Setiap aspek dibagi lagi ke dalam sub-aspek, seperti indikator keberhasilan, sumber daya manusia, koordinasi, sikap pelaksana, hingga respon dan intensitas disposisi implementor. Pembatasan fokus ini penting untuk memastikan penelitian berjalan terarah dan mendalam. Sasaran penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelaksanaan ProKlim, di antaranya Kepala Desa, pengelola ProKlim, Kasi Kesejahteraan Desa, serta masyarakat yang direpresentasikan oleh Ketua RT dan RW. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria tertentu agar informan benar-benar relevan terhadap tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Observasi dilakukan secara terbuka dengan mengamati situasi lapangan, sedangkan wawancara difokuskan pada penggalian informasi dari informan kunci. Dokumentasi melengkapi data penelitian dengan mengacu pada sumber-sumber tertulis seperti laporan, arsip, maupun artikel terkait. Data yang digunakan terdiri dari data primer hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan, jurnal, dan dokumen lainnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memastikan data yang diperoleh tidak hanya terakumulasi, tetapi juga disaring, ditafsirkan, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi Program Kampung Iklim di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hubungan Antar Organisasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), hubungan antarorganisasi (inter-organizational relationships) merupakan pola koordinasi, kerja sama, dan interaksi yang terjadi antara berbagai lembaga atau unit yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hubungan ini mencakup mekanisme komunikasi, alur koordinatif, pembagian tugas, serta tingkat sinergi yang terbentuk antarorganisasi dalam jaringan kebijakan. Mereka menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pelaksana utama, tetapi juga pada kemampuan berbagai organisasi pendukung untuk berkolaborasi secara efektif, karena ketidakharmonisan hubungan antarorganisasi dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan (Van Meter & Van Horn dalam *The Policy Implementation Process*, 1975). Dalam konteks implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang, hubungan antarorganisasi terbentuk melalui koordinasi antara pemerintah desa, kelompok kerja ProKlim, Dinas Lingkungan Hidup, kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, kelompok tani, serta mitra pendukung lainnya. Kolaborasi tersebut terlihat dari adanya forum musyawarah desa, kegiatan selapanan, pendampingan DLH, dan pembagian peran dalam pelaksanaan aksi adaptasi maupun mitigasi.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Wazni [7] yang menemukan bahwa hubungan kelembagaan yang kuat antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan dinas teknis dapat meningkatkan efektivitas implementasi ProKlim. Sementara itu, penelitian Nielwaty et al. [8] juga menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim di berbagai daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas organisasi, terutama ketika program menuntut kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana hubungan antarorganisasi di Desa Cikidang mampu mendukung pelaksanaan program melalui komunikasi yang intensif, pembagian tugas yang

jas, serta kerja sama dalam penyediaan fasilitas lingkungan seperti bank sampah, sumur resapan, dan lahan penghijauan. Berdasarkan teori dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antarorganisasi di Desa Cikidang berada pada kategori baik dan menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan implementasi ProKlim di wilayah tersebut. Hubungan antar organisasi mencakup koordinasi, komunikasi, dan konsistensi antar pihak yang berperan. Tanpa adanya sinergi yang baik, kebijakan publik akan sulit mencapai tujuan karena terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, minimnya komunikasi, ataupun inkonsistensi pelaksanaan. Dalam konteks implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang, hubungan antar organisasi menjadi faktor strategis dalam memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat bergerak selaras sesuai tujuan kebijakan. Pada indikator koordinasi, pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup, serta kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, dan kelompok tani melakukan pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Koordinasi ini meliputi penyusunan agenda kegiatan, pemantauan, hingga tindak lanjut aksi nyata di lapangan. Sementara itu, pada aspek komunikasi, jalur komunikasi formal maupun informal digunakan untuk memastikan informasi kebijakan tersampaikan dengan baik, mulai dari tingkat RT hingga pemerintah kabupaten. Komunikasi ini berlangsung melalui forum selapanan desa, rapat koordinasi, serta sosialisasi yang rutin dilakukan. Selanjutnya, konsistensi aspek terlihat dari upaya seluruh aktor yang menjaga program kesinambungan, baik melalui pendampingan, pelatihan, maupun integrasi ProKlim dengan program pembangunan lainnya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang menyatakan: “Dengan adanya tim pelatihan, harapan kami semua OPD yang terlibat dalam program ini bisa mempunyai inisiatif untuk mendorong kegiatan yang berkaitan dengan ProKlim, baik dalam bentuk pelatihan maupun penyediaan sarana-prasarana. Jadi program ini tidak hanya milik DLH, tetapi juga milik semua OPD, termasuk camat dan desa. Kutipan tersebut menekankan pentingnya koordinasi organisasi dan konsistensi dalam melaksanakan ProKlim agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, hubungan antar organisasi dalam implementasi ProKlim di Desa Cikidang menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi, dan konsistensi menjadi fondasi utama yang mendukung keberhasilan kebijakan. Kolaborasi multi-aktor ini sejalan dengan pandangan Van Horn dan Van Meter yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan hasil kerja sama yang terintegrasi dari berbagai organisasi yang terlibat.

### 3.2 Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik agen pelaksana (*disposition and characteristics of implementing agencies*) merupakan atribut, kemampuan, dan kecenderungan dari organisasi atau individu yang menjalankan kebijakan. Karakteristik tersebut mencakup struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, tingkat kompetensi teknis, pola komunikasi internal, serta sikap atau komitmen pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Mereka menegaskan bahwa karakteristik agen pelaksana berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi, sebab pelaksana yang memiliki kapasitas, kemauan, dan dukungan struktural yang memadai akan mampu menjalankan program secara lebih konsisten dan adaptif (Van Meter & Van Horn dalam *The Policy Implementation Process*, 1975). Dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang, karakteristik agen pelaksana dapat dilihat melalui peran pemerintah desa, kelompok kerja ProKlim, kader lingkungan, PKK, karang taruna, dan kelompok tani sebagai pelaksana utama kegiatan adaptasi dan mitigasi. Berdasarkan dokumen penelitian, para pelaksana memiliki struktur organisasi yang jelas dan rutin melaksanakan kegiatan seperti pembuatan biopori, pengelolaan sampah, penghijauan, serta pertanian terpadu. Selain itu, agen pelaksana menunjukkan komitmen tinggi melalui kegiatan partisipatif masyarakat, forum musyawarah, dan koordinasi rutin lintas kelompok sebagaimana tergambar dalam kegiatan selapanan

desa dan koordinasi kelembagaan ProKlim .

Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana berada pada kategori baik, dilihat dari tingginya keterlibatan masyarakat, kecakapan teknis dalam kegiatan lingkungan, serta adanya koordinasi yang mendukung keberlanjutan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nielwaty et al. [8] yang menyatakan bahwa keberhasilan ProKlim sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan komitmen agen pelaksana dalam mengelola program lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian Fitria dan Wazni [7] juga menunjukkan bahwa desa dengan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan komitmen kuat cenderung memperoleh kategori ProKlim yang lebih tinggi. Dengan demikian, berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kondisi empiris di Desa Cikidang, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana di desa tersebut telah mendukung keberhasilan implementasi ProKlim, yang tercermin dari konsistensi kegiatan adaptasi, mitigasi, dan penguatan kelembagaan yang dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Menurut Van Horn dan Van Meter, karakteristik agen pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Karakteristik ini mencakup sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan serta struktur birokrasi yang mekanisme mengatur pelaksanaannya. Agen pelaksana yang memiliki sikap positif, konsisten, dan penuh komitmen akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas dan adaptif akan memudahkan koordinasi lintas sektor serta memperlancar jalannya program di lapangan. Dalam implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Cikidang, sikap agen pelaksana dipimpin oleh Ketua/Pengelola Proklim yang aktif menggerakkan masyarakat melalui berbagai kegiatan lingkungan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana, namun juga sebagai motivator dan teladan dalam membangun kesadaran warga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini tampak dari wawancara dengan Ketua Proklim yang menyampaikan: “Kami di kelompok Proklim ini berusaha menjaga konsistensi, meskipun ada keterbatasan dana dan fasilitas. Yang penting masyarakat mau ikut bergerak, seperti memilah sampah, menanam pohon, dan memanfaatkan pekarangan rumah. Itu yang kami dorong setiap hari.”. Dari sisi struktur birokrasi, pelaksanaan Proklim di Desa Cikidang difasilitasi melalui koordinasi pemerintah desa dengan pengelola Proklim sebagai pelaksana utama di lapangan, serta didukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai pembina teknis. Struktur ini menunjukkan adanya sinergi antara tingkat desa dan kabupaten yang saling melengkapi, sehingga kebijakan dapat dijalankan sesuai pedoman yang ada. Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan Proklim di Desa Cikidang mencerminkan adanya sikap yang penuh komitmen dari pengelola Proklim serta dukungan struktur birokrasi yang memungkinkan program berjalan secara konsisten. Hal ini memperkuat pandangan Van Horn dan Van Meter bahwa kombinasi sikap positif dan struktur birokrasi yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan implementasi kebijakan publik.

### **2.3 Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi sosial, politik, dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial mencakup pola interaksi masyarakat, tingkat partisipasi, nilai-nilai yang dianut, serta kohesi sosial yang terbentuk dalam komunitas. Kondisi politik mencakup dukungan pemerintah, stabilitas kepemimpinan, komitmen pejabat publik, serta keberadaan regulasi atau kebijakan pendukung. Sementara itu, kondisi ekonomi mengacu pada kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan sumber daya finansial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa ketiga kondisi ini dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat implementasi kebijakan, tergantung sejauh mana sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan kapasitas ekonomi terbentuk secara optimal (Van Meter & Van Horn dalam *The Policy Implementation Process*, 1975). Dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang, ketiga kondisi tersebut turut berperan penting. Dari aspek sosial, masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi tinggi melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah,

pembuatan biopori, dan aktivitas lingkungan lain yang dilakukan secara gotong royong.

Kondisi ini menunjukkan bahwa norma sosial setempat mendukung perilaku pro-lingkungan. Dari aspek politik, dukungan pemerintah desa terlihat melalui penyediaan anggaran, fasilitasi kegiatan, koordinasi kelembagaan, serta dorongan kepada kelompok masyarakat untuk aktif dalam program lingkungan. Stabilitas kepemimpinan desa dan keberpihakan pemerintah terhadap isu lingkungan menjadi faktor yang memperkuat kelancaran program. Sementara itu, dari aspek ekonomi, masyarakat Desa Cikidang memanfaatkan kombinasi antara dana desa, swadaya, dan kemitraan untuk menjalankan program, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan ProKlim. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Wazni [7] yang menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim di berbagai daerah dipengaruhi oleh kuatnya dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Penelitian Nielwaty et al. [8] juga mengungkapkan bahwa kondisi sosial yang solid dan dukungan politik yang konsisten dapat meningkatkan efektivitas program lingkungan, meskipun kondisi ekonomi terbatas, selama terdapat kolaborasi dan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi Desa Cikidang secara keseluruhan mendukung keberhasilan implementasi ProKlim, yang tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat, komitmen pemerintah desa, dan kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya finansial.

Menurut Van Horn dan Van Meter, kondisi sosial, politik, dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kondisi sosial berkaitan dengan nilai, norma, dan pola interaksi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi dalam program; kondisi politik berkaitan dengan dukungan atau resistensi aktor politik dan konsistensi kebijakan pemerintah; sedangkan kondisi ekonomi mencakup kapasitas finansial baik pemerintah maupun masyarakat dalam menopang kegiatan program. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi peluang yang memperkuat implementasi, namun juga bisa menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Cikidang, lingkungan sosial masyarakat menunjukkan karakter gotong royong yang masih kuat. Hal ini tercermin dari keterlibatan warga dalam kerja bakti, kegiatan penghijauan, hingga pengelolaan bank sampah. Dukungan sosial ini membantu menciptakan partisipasi yang luas dalam pelaksanaan Proklim.

Pada aspek lingkungan politik, dukungan pemerintah desa dan perangkatnya sangat menentukan jalannya program. Aparat desa secara konsisten mendorong keterlibatan masyarakat dengan memberikan fasilitas dan koordinasi, sementara dukungan kebijakan dari tingkat kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat legitimasi program. Kondisi politik yang kondusif ini memungkinkan program berjalan lebih terarah.

Sementara itu, lingkungan ekonomi masyarakat Desa Cikidang masih relatif terbatas karena sebagian besar warganya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Keterbatasan ekonomi ini membuat masyarakat harus lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti penggunaan pupuk organik, pemanfaatan pekarangan, serta adanya bank sampah yang tidak hanya bermanfaat untuk kebersihan tetapi juga memberikan tambahan penghasilan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu Ketua RT yang menyampaikan dalam wawancara: “Warga di sini kebanyakan petani, jadi ekonominya sederhana. Tapi justru dengan adanya Proklim ini, mereka bisa belajar memanfaatkan lahan pekarangan, membuat pupuk organik, sampai ikut bank sampah. Selain lingkungan jadi lebih bersih, ada juga nilai tambah ekonomi untuk warga.” Kutipan ini menunjukkan bagaimana aspek sosial, politik, dan ekonomi saling mempengaruhi keberhasilan implementasi Proklim di tingkat desa. Dengan demikian, kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Desa Cikidang mendukung penerapan Proklim secara signifikan. Nilai sosial berupa gotong royong, iklim politik yang kondusif, serta adaptasi ekonomi masyarakat terhadap keterbatasan menjadi faktor yang memperkuat efektivitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Horn dan Van Meter bahwa faktor eksternal memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

## 2.4 Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), disposisi implementor merupakan sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Disposisi ini mencakup tingkat penerimaan implementor terhadap tujuan kebijakan, kemauan untuk melaksanakan program sesuai aturan, serta motivasi dalam menjalankan tanggung jawab. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa meskipun sebuah kebijakan memiliki desain yang baik, keberhasilannya tetap sangat ditentukan oleh sikap dan komitmen para pelaksana di lapangan. Ketika implementor memiliki disposisi positif, mereka cenderung menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan konkret secara efektif, sedangkan sikap yang negatif atau rendahnya komitmen dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi (Van Meter & Van Horn dalam *The Policy Implementation Process*, 1975).

Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang, disposisi implementor dapat dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari tingginya motivasi dan kemauan pelaksana—seperti kelompok kerja ProKlim, kader lingkungan, PKK, karang taruna, serta pemerintah desa—dalam melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi. Mereka menunjukkan sikap responsif melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, penyusunan rencana aksi, hingga koordinasi rutin dengan pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup. Komitmen tersebut juga tampak dalam keberlanjutan aktivitas lingkungan yang tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan dana, yang menunjukkan bahwa implementor memiliki iktikad kuat untuk mempertahankan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Wazni [7] yang menyatakan bahwa disposisi positif dari pelaksana, khususnya komitmen dan kemauan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan ProKlim di tingkat desa. Penelitian Nielwaty et al. [8] juga mengungkapkan bahwa desa yang mencapai kategori tinggi ProKlim biasanya memiliki implementor yang berkomitmen kuat dan konsisten melaksanakan kegiatan lingkungan. Dengan demikian, berdasarkan teori dan perbandingan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor di Desa Cikidang berada pada kategori baik dan berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim, tercermin dari konsistensi kegiatan adaptasi, mitigasi, serta partisipasi masyarakat yang terus berkembang.

Dalam perspektif Van Horn dan Van Meter, disposisi pelaksana adalah sikap, pemahaman, dan preferensi nilai-nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terhadap program yang dijalankan. Disposisi ini berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi, karena pelaksana yang memiliki respon positif, pemahaman yang baik, serta intensitas disposisi yang kuat akan lebih konsisten dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk menilai disposisi pelaksana yaitu respon pelaksana, kognisi, dan intensitas disposisi pelaksana.

Dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Cikidang, respon pelaksana terlihat dari sikap pemerintah desa yang mendukung penuh kegiatan pengelolaan lingkungan, seperti sosialisasi, penghijauan, dan pengelolaan sampah. Respon positif ini menjadi dorongan penting bagi masyarakat untuk ikut terlibat aktif. Dari sisi kognisi, para pelaksana memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya mitigasi maupun adaptasi, sehingga kebijakan tidak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga dipahami nilai manfaatnya bagi masyarakat. Sedangkan intensitas disposisi pelaksana diwujudkan dari konsistensi aparat desa dalam mengintegrasikan ProKlim ke dalam kegiatan pembangunan desa, serta komitmen jangka panjang untuk menjaga keinginan program meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Cikidang dalam wawancara yang menyatakan: “Kami di desa selalu berusaha mensosialisasikan ProKlim kepada masyarakat agar mereka paham bahwa ini bukan hanya program sesaat. ProKlim ini untuk bertahan, jadi harus dijalankan bersama-sama. Kami mendukung penuh dan selalu berusaha mengajak masyarakat agar ikut.” Kutipan ini menggambarkan bahwa disposisi pelaksana di tingkat desa diwujudkan melalui respon yang positif, pemahaman yang baik, serta intensitas disposisi yang kuat dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, disposisi pelaksana

dalam pelaksanaan Proklim di Desa Cikidang dapat dikoreksi dengan baik. Hal ini sejalan dengan model Van Horn dan Van Meter yang menekankan bahwa disposisi pelaksana yang positif menjadi salah satu syarat utama keberhasilan implementasi kebijakan publik.

#### 4. KESIMPULAN

Keberhasilan Program Kampung Iklim di Desa Cikidang tidak hanya mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi model yang layak direplikasi untuk pembangunan berbasis komunitas di desa-desa lain. ProKlim telah membuktikan dirinya sebagai program yang mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal secara berkelanjutan dan mandiri.

#### REFERENSI

- [1] Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- [2] Pristandaru, D. L. (2024). Resmi, 2023 Dinobatkan Sebagai Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah. Kompas.com. <https://lestari.kompas.com/read/2024/01/10/080000686/resmi-2023-dinobatkan-sebagai-tahun-terpanas-sepanjang-sejarah> Diakses 12 Oktober 2024
- [3] W., A., Nurwati, I., Pratiwi, M., Sani, Y., Sistha, Intan, Patrice, Mangantar, & Tias. (2021). *Panduan Fasilitasi Desa peduli iklim* (1 ed.). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [4] Oktaviana, R. F., Edison, & Setiawan, R. (2021). Analisis Jejaring Aktor Dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19, 251–261.
- [5] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Ed.). (2023). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023* (2023 ed.). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>
- [6] Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim. (2017). *Buku Praktis ProKlim*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ISBN: 978-602-74644-2-1.
- [7] Fitria, S., & Wazni. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Tahun 2020. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, 9, 1–11.
- [8] Nielwaty, E., Meriansari, F., & Hermanto. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Iklim (Proklim) Studi Pada RW12 Kelurahan Umbansari Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3, 43–56. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i2.458>
- [9] Pariangu, U. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kabupaten Kupang. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13, 307–325. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3310>
- [10] Syibli Hadziq A. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Tangerang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang Tahun 2023*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.